

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Simpulan**

1. Pelaksanaan kegiatan PTSL tahun anggaran 2020 berjalan seiring dengan munculnya virus covid-19 yang mengakibatkan semua rancangan kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang telah disusun dari tahap perencanaan hingga tahap penerbitan sertipikat mengalami perubahan. Bahkan petunjuk teknis juga mengalami beberapa revisi yang tentunya akan membuat proses kegiatan PTSL akan berubah. Mulai dari perubahan anggaran, target, strategi di lapangan bahkan penyerahan sertipikat yang akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini tentu menambah daftar hambatan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat. Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi baru dan inovasi-inovasi baru untuk menyelesaikan target dengan tepat waktu.
2. Hambatan dalam pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat
  - a. Hambatan Eksternal
    - 1) Antusias masyarakat/minatnya masyarakat
    - 2) Pihak desa tidak berkerja sama (*cooperative*)
    - 3) Alas hak tidak lengkap atau dokumen tidak tersedia
    - 4) Bidang yang didalam tidak sesuai dengan alas hak
    - 5) Pemohin berada diluar wilayah

- 6) Petunjuk batas tidak tahu sejarah tanahnya
  - 7) Sengketa waris
  - 8) Sengketa lahan
  - 9) Sengketa batas
- b. Hambatan Internal
- 1) Petunjuk teknis/ juknis berubah berkali-kali
  - 2) Koordinasi puldadis dan puldasik tidak efisien
  - 3) Banyak berkas tidak ada bidang dan banyak bidang tidak ada berkas
- c. Hambatan pada masa COVID-19
- 1) Penyuluhan dibatasi
  - 2) Anggaran dikurangi
  - 3) Target dikurangi
  - 4) Petugas lapang sulit bertemu dengan pemohon

## **B. Saran**

Pandemi covid-19 mengakibatkan banyak hambatan terhadap pelaksanaan kegiatan PTSL seperti yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya. Sehingga di butuhkan strategi dan inovasi baru untuk menyelesaikan target dengan tepat waktu. Di harapkan kepada pemerintah agar melakukan pembahasan perubahan program kegiatan PTSL di masa pandemi covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Arba. H.M ,2015, *Hukum Agraria Indonesia*, jakarta: Sinar grafika.

Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Istiqamah, *Tinjauan Hukum Legalisasi Aset Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Kepemilikan Tanah*, Jurnal

Jurisprudentie Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar Volume 5 Nomor 2 Juni 2018

M. Syamsudin, 2007. *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Nazir, Moh. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Ronny Hanitijo Soemitro , 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, jakarta: Ghalia Indonesia.

Sahnan, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, malang: setara press kelompok intrans publishing.

Samun Ismaya, 2011. *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).

Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kementerian kesehatan Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 27 tahun 2017 *tentang pedoman PPI. Pencegahan dan pengendalian infeksi (ppi).*

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2017. *Pedoaman kesiapsiagaan menghadapi MERSCov di indonesia.*

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Nasional Nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

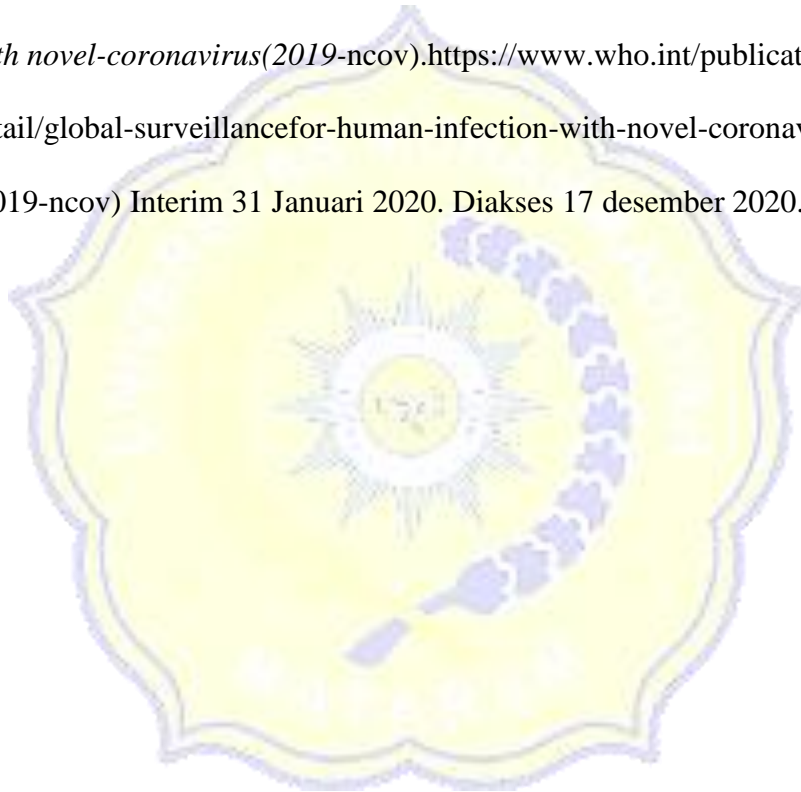
## **INTERNET**

Channel New Asia (2020) Wuhan virus outbreak 15 medical workers infected, 1  
in critical condition [Homepage on the internet]. Cited Jan 28th 2020.

Available on:[https://www.channelnewsasia.com/news/asia](https://www.channelnewsasia.com/news/asia/wuhan-pneumonia-outbreak-health-workers-coronavirus-12294212)

[wuhan-pneumonia-outbreak-health-workers-coronavirus-12294212](https://www.channelnewsasia.com/news/asia/wuhan-pneumonia-outbreak-health-workers-coronavirus-12294212)

World Health Organization (WHO).2020. *Global surveillance for human infection  
with novel-coronavirus(2019-ncov)*.[https://www.who.int/publications-  
detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-  
\(2019-ncov\)](https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)) Interim 31 Januari 2020. Diakses 17 desember 2020.





## LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jln Sukarno - Hatta Giri Menang Gerung Email: Bpn.lobar@gmail.com

**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NOMOR: 64.a /KEP-100.PTSL/III/2019

TENTANG

REVISI KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK  
BARAT NOMOR 46/KEP-100.PTSL/II/2019 TANGGAL 04 FEBRUARI 2019  
TENTANG SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN  
TUGAS YURIDIS DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DESA: PENIMBUNG, MAMBALAN, KEKERI, MIDANG, GUNUNG SARI,  
SESELA, JATISELA, MEKARSARI, RANJOK. KECAMATAN: GUNUNG SARI  
DESA: BABUSSALAM KECAMATAN: GERUNG  
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019

Menimbang

- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kepala Kantor perlu membentuk dan menetapkan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa: Penimbung, Mambalan, Kekeri, Midang, Gunung Sari, Sesela, Jatisela, Mekarsari, Ranjok, Kecamatan: Gunung Sari, dan Desa: Babussalam Kecamatan: Gerung, Kabupaten: Lombok Barat Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

DELAPAN : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Gerung

Pada tanggal 12 Maret 2019

KEPALA KANTOR PERTANAHAN/  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

I MADE ARYA SANJAYA, S.H., M.H.

NIP. 196905101993031002

Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
3. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Bupati Lombok Barat.



- a. pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada Gambar Ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya;
- b. melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan Peta Bidang Tanah;
- c. menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah pada aplikasi KKP; dan
- d. menandatangani Gambar Ukur dan seluruh dokumen dan peta hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah; dan
- e. membuat peta pendaftaran tanah sebagai dasar pengumpulan data fisik dan data yuridis

**KELIMA**

Satgas Yuridis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Yuridis mempunyai tugas:

- a. melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan/ penguasaan bidang tanah;
- b. memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;
- c. membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi;
- d. membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala;
- e. menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;
- f. menginventarisasi sanggahan/keberatan dan penyelesaiannya;
- g. menyiapkan data untuk pembuatan Daftar Isian dan pemeriksaan sertipikat; dan
- h. menginput kegiatan PTSL ke dalam Aplikasi KKP.

**KEENAM**

Satgas Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Administrasi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas pengetikan, penggandaan dokumen, penerimaan surat-surat umum dan pemberian tanda terimanya dan pekerjaan administratif lainnya;
- b. menyiapkan laporan ke Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN dan unit kerja lain yang dianggap perlu;
- c. menyiapkan daftar hadir;
- d. membuat laporan hasil rapat;
- e. menyiapkan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;
- f. membuat evaluasi untuk laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;
- g. menyiapkan pencetakan/penjahitan sertipikat; dan
- h. mempersiapkan pertanggungjawaban keuangan.

**KETUJUH**

Sumber pendanaan untuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini berasal dari Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor: DIPA-056.01.2.432150/2019 tanggal 05 Desember 2018.



MEMUTUSKAN.

- Menetapkan REVISI KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 46/KEP-100/PTSL/II/2019 TANGGAL 04 FEBRUARI 2019 TENTANG REVISI SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN TUGAS YURIDIS DAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DESA: PENIMBUNG, MAMBALAN, KEKERI, MIDANG, GUNUNG SARI, SESELA, JATISELA, MEKARSARI, RANJOK, KECAMATAN: GUNUNG SARIDAN DESA: BABUSSALAM KECAMATAN: GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019
- KESATU Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran-1 Surat Keputusan ini sebagai anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk melaksanakan pendaftaran tanah sistematis Lengkap di Desa: Penimbung, Mambalan, Keker, Midang, Gunung Sari, Sesela, Jatisele, Mekarsari, Kecamatan: Gunung Sari, dan Babussalam Kecamatan Gerung, Kabupaten: Lombok Barat Tahun 2019.
- KEDUA Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel.  
Panitia Ajudikasi PTSL mempunyai tugas:  
a. menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL;  
b. mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya,  
c. memberikan asistensi Terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
d. memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;  
e. mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang sudah dikumpulkan;  
f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan;  
g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e, sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak,  
h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan, dan  
i. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.
- KETIGA Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik), Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis), dan Satuan Tugas Administrasi (Satgas Administrasi), dengan susunan keanggotaan Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran-2, Lampiran-3 dan Lampiran-4 Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT Satgas Fisik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Fisik mempunyai tugas.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1111);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Tanggal : 2  
Januari 2019 Pendaftaran Tanah Sistematis  
Lengkap Nomor : 6.a/BA52.01.100.1/1/2019



Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat  
 Nomor : 64.a/KEP-100.PTSL/III/2019  
 Tanggal : 12 MARET 2019  
 Lampiran : 6  
 Hal : KONTROL KUALITAS PENGUKURAN

NO	NAMA PETUGAS/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5
1.	I MADE ARYA SANJAYA, S.H., M.H. NIP. 19690510 199303 1 002	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT	KONTROL KUALITAS PENGUKURAN	1. PENIMBUNG 2. MAMBALAN
2.	RURY IRAWAN, S.SiT. NIP. 19760118 199503 1 001	KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR PERTANAHAN	KONTROL KUALITAS PENGUKURAN	3. KEKERI 4. MIDANG
3.	MUHAMMAD ZARNUJI, S.Tr. NIP. 19870405 200903 1 001	Kepala Sub. Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan Dasar dan Tematik Pertanahan	KONTROL KUALITAS PENGUKURAN	5. GUNUNG SARI 6. SESELA
4.	MAULYNA SRI AUGUSTIA, ST NIP. 19860816 201101 2 010	Kepala Seksi Penataan Pertanahan	KONTROL KUALITAS PENGUKURAN	7. JATISELA 8. MEKAR SARI
5.	DARMAWAN WIBOWO, S.ST NIP. 19790312 199903 1 002	Kepala Seksi Pengadaan Tanah	KONTROL KUALITAS PENGUKURAN	9. RANJOK 10. BABUSSALAM
6.	H. MASTUR, S.H. NIP. 19621231 199010 1 003		KONTROL KUALITAS PENGUKURAN	

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
 KABUPATEN LOMBOK BARAT

I MADE ARYA SANJAYA, S.H., M.H.  
 NIP. 19690510199 3031002

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat

Nomor : 64.a /KEP-100.PTSL/III/2019

Tanggal : 12 MARET 2019

Lampiran : 5

HAL : KOORDINATOR TIM SATUAN TUGAS FISIK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

NO	NAMA PETUGAS/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5
TIM 1				
1.	MAULYNA SRI AUGUSTIA, ST NIP. 19860816 201101 2 010	Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan Dasar dan Tematik Pertanahan	KETUA (merangkap Koordinator)	1. PENIMBUNG
2.	PRASETYO TRI WANDANI NIP. 1920116 201801 1 001	Staf Sub.Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	KOORDINATOR	2. MAMBALAN 3. MEKAR SARI 4. KEKERI
TIM 2				
1.	ILHAM JAUHARI, S.Tr. NIP. 19870812 200903 1 001	Kepala Sub.Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu	KETUA (merangkap Koordinator)	1. MIDANG
2.	ISMED FATURRAHMAN MAULANA NIP. 19901015 200912 1 001	Staf Sub.Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	KOORDINATOR	2. RANJOK 3. BABUSSALAM
TIM 3				
1.	MUHAMMAD ZARNUJI, S.Tr. NIP. 19870405 200903 1 001	Kepala Sub.Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	KETUA (merangkap Koordinator)	1. GUNUNG SARI
2.	SAHLAN ROFIQI, A.P NIP. 19900327 201801 1 002	Staf Sub.Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	KOORDINATOR	2. SESELA 3. JATISELA

K  
KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN LOMBOK BARAT A

I MADE ARYA SANJAYA, S.H., M.H.

NIP. 196905101993031002



1	2	3	4	5
3.	TIM 3			
	1. MUHAMMAD ZARNUJI, S.Tr. NIP. 19870405 200903 1 001	Kepala Sub.Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	Satgas Fisik (merangkap Koordinator)	1. GUNUNG SARI 2. SESELA 3. JATISELA
	2. SAHLAN ROFIQI, A.P NIP. 19900327 201801 1 002	Staf Sub.Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	COORDINATOR	
	3. ZULKIFLI NIP. -	Asisten Surveyior	PETUGAS UKUR	
	4. SULISTINO NIP. -	Asisten Surveyior	PETUGAS UKUR	
	5. RIANG BANI SAMUDRA NIP. -	Asisten Surveyior	PEMBANTU UKUR	
	6. HANDANI APRIADI NIP. -		PEMBANTU UKUR	
	7. RAKSA DIRAKSA NIP. -		PEMBANTU UKUR	
	8. YENI INDRAYANI OKTAVIANA NO. LISENSI: 2-0552-14	Asisten Surveyior	PEMBANTU UKUR	
	9. AHMADI NIP. -		PEMBANTU UKUR	
	10. SIGITSANTOSO NIP. -		PEMBANTU UKUR	

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

I MADE ARYA SANJAYA, S.H., M.H.  
NIP. 196905101993031002

1	2	3	4	5
2.	TIM 2			
	1. ILHAM JAUHARI, S.Tr. NIP. 19870812 200903 1 001	Kepala Sub.Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu	Satgas Fisik (merangkap Koordinator)	1. MIDANG
	2. ISMED FATURRAHMAN MAULANA NIP. 19901015 200912 1 001	Staf Sub.Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	KOORDINATOR	2. RANJOK
	3. BUHARI MUSLIM NIP. 19860126 201402 1 002	Staf Sub.Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	PETUGAS UKUR	3. BABUSSALAM
	4. ILAM FAULANA N NIP. -	Asisten Surveyior	PETUGAS UKUR	
	5. AKHMAD KHATIB NIP. -	Asisten Surveyior	PEMBANTU UKUR	
	6. AHMAD KASFYI NO. LISENSI: 2-0493-14	Asisten Surveyior	PEMBANTU UKUR	
	7. MUHAMMAD ERWANDI NIP. -		PEMBANTU UKUR	
	8. LALU SUARDIMAN NIP. -	PPNP	PEMBANTU UKUR	
	9. TAMRIN HIDAYAT NIP. -		PEMBANTU UKUR	
	10. ALUNG NIZAMUDIN NIP. -		PEMBANTU UKUR	



Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat

Nomor : 64.a /KEP-100.PTSL/III/2019

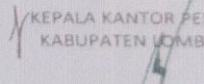
Tanggal : 12 MARET 2019

Lampiran : 4

HAL : SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS FISIK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

NO	NAMA PETUGAS/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5
1	TIM 1			
	1. MAULYNA SRI AUGUSTIA, ST NIP. 19860816 201101 2 010	Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan Dasar dan Tematik Pertanahan	Satgas Fisik (merangkap Koordinator)	1. PENIMBUNG
	2. PRASETYO TRI WANDANI NIP. 1920116 201801 1 001	Staf Sub,Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	KOORDINATOR	2. MAMBALAN
	3. LALU GUNAWAN NO. LISENSI: 2-0190-13	Asisten Surveyior	PETUGAS UKUR	3. MEKAR SARI
	4. WAHYUDIN NO. LISENSI: 2-0286-16	Asisten Surveyior	PETUGAS UKUR	4. KEKERI
	5. MAULANA BAYU PRATAMA NO. LISENSI: 2-0288-16	Asisten Surveyior	PEMBANTU UKUR	
	6. DEWI MAHAHENDRA RIANA NO. LISENSI: 2-0503-14	Asisten Surveyior	PEMBANTU UKUR	
	7. Imam Ahmad A NIP. -		PEMBANTU UKUR	
	8. NI MADE AYU WULANTASTRI NO. LISENSI: 2-0537-14	Asisten Surveyior	PEMBANTU UKUR	
	9. RIDWAN		PEMBANTU UKUR	
	10. SAHRUL HADI		PEMBANTU UKUR	

TIM 3	2	3	4	5
1. LALU FIRMAN SUKMAJAYA, S.H., M.H. NIP. 19860407 200912 1 005	Kepala Sub.Seksi Pendaftaran Hak Tanah	Wakil Ketua merangkap anggota	1. GUNUNG SARI	
2. PUSPA JOHANA NIP. 19811231 200701 1 001	Staf Sub.Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah	Sekretaris	2. SESELA	
3. WAHYU BUDI PURWANTO, SH.	PPNPN	Anggota	3. JATISELA	
4. BAIQ LENA SISKI SORAYANI, SP.	PPNPN	Anggota		


 KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
 KABUPATEN LOMBOK BARAT

I MADE ARYA SANJAYA, S.H., M.H.  
 NIP. 196905101993031002



Jurusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat

Jumlah : 64 a /KEP-100.PTSL/III/2019

Tanggal : 12 MARET 2019

Lampiran : 3

HAL : SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS YURIDIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

NO	NAMA PETUGAS/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5
1.	TIM 1			
	1. LALU GIGIH FATRIANSAH, S.H. NIP. 19860521 200912 1 002	Kepala Sub.Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	Ketua merangkap anggota	1. PENIMBUNG
	2. ERNAWATI	PPNPN	Anggota	2. MAMBALAN
	3. ASTRIO FUJI HARJANTO S	PPNPN	Anggota	3. MEKAR SARI
	4. HILMAN JAHARI	PPNPN	Anggota	4. KEKERI
2.	TIM 2			
	1. N U R D A N NIP. 19651231 198701 1 003	Kepala Sub.Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat	Wakil Ketua merangkap anggota	1. MIDANG
	2. RONY MAULANA ADEKANTARI	PPNPN	Anggota	2. RANJOK
	3. DWI ELI SAPUTRI	PPNPN	Anggota	3. BABUSSALAM
	4. AHMAD JUFRI SAHID, SH.	PPNPN	Anggota	

2	3	4	5
26. AMINUDIN, SH NRP. 74030627	KASI HUMAS POLSEK GUNUNG SARI	PETUGAS PENYULUH	
27. NURSIDI NRP. 761200777	Ps. KANIT BINTIMAS SAT BINMAS RES LOBAR	PETUGAS PENYULUH	
28. I MADE SURYA ADNYANA NRP. 79060921	BA UNIT BINPOLMAS SAT BINMAS RES LOBAR	PETUGAS PENYULUH	

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

I MADE ARYA SANJAYA, S.H., M.H.  
NIP. 196905101993031002



2	3	4	5
11. LALU FIRMAN SUKMAJAYA, S.H., M.H. NIP. 19860407 200912 1 005	KEPALA SUB SEKSI PENDAFTARAN HAK TANAH	PETUGAS PENYULUH	
12. ILHAM JAUHARI, S.Tr. NIP. 19870812 200903 1 001	KEPALA SUB SEKSI PENATAGUNAAN TANAH DAN KAWASAN TERTENTU	PETUGAS PENYULUH	
13. MUHAMMAD ZARNUJI, S.Tr. NIP. 19870405 200903 1 001	KEPALA SUB SEKSI PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL	PETUGAS PENYULUH	
14. N U R D A N NIP. 19651231 198701 1 003	KEPALA SUB SEKSI PENETAPAN HAK TANAH DAN PEMBERDAYAAN HAK TANAH MASYARAKAT	PETUGAS PENYULUH	
15. LALU GIGIH PATRIANSAH, S.H. NIP. 19860521 200912 1 002	KEPALA SUB SEKSI PENANGANAN SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN	PETUGAS PENYULUH	
16. MAULYNA SRI AUGUSTIA, ST NIP. 19860816 201101 2 010	Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan Dasar dan Tematik Pertanahan	PETUGAS PENYULUH	
17. I GST. AYU ADNYAWATI, SH NIP. 19720202 199403 2 002	Kepala Sub.Seksi Pengendalian, Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar	PETUGAS PENYULUH	
18. AL VICTOR PUJA BERLIAN, S.E. NIP. 19900216 201402 1 002	Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian	PETUGAS PENYULUH	
19. MIFTAH RULI HARTANTO, S.E. NIP. 19850701 200912 1 004	Kepala Urusan Keuangan dan BMN	PETUGAS PENYULUH	
20. BUDI SATRIANA, S.H. NIP. 19820713 200703 1 001	INTELIJEN KEJARI MATARAM	PETUGAS PENYULUH	
21. GUFRAN, S.H. NIP. 19841231 200912 1 004	SIMKARI KEJARI MATARAM	PETUGAS PENYULUH	
22. YUNISA AKBAR NIP. 19900620 201012 1 002	INTELEJEN KEJARI MATARAM	PETUGAS PENYULUH	
23. IPTU KAHAR MZ, S.H. NRP. 66030309	KAPOLSEK GUNUNG SARI	PETUGAS PENYULUH	
24. BRIGADIR SUGIANTO, S.Sos. NRP. 79120502	BRIGADIR SAT RESKRIM POLRES MATARAM	PETUGAS PENYULUH	
25. I KETUT ARINA NRP. 62110097	WAKAPOLSEK GUNUNG SARI	PETUGAS PENYULUH	

Puskesmas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat

Nomor : 64.a /KEP-100.PTSL/III/2019

Tanggal : 12 MARET 2019

Lampiran : 2

Hal : PETUGAS PENYULUH PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) WILAYAH KERJA KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019

1	2	3	4	5
	1. I. MADE ARYA SANJAYA, S.H., M.H. NIP. 19690510 199303 1 002	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT	PETUGAS PENYULUH	1. PENIMBUNG
	2. HJ. NURHIDAYATI, S.Sos NIP.19690730 199903 2 002	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	PETUGAS PENYULUH	2. MAMBALAN
	3. RURY IRAWAN, S.SIT NIP.19760118 199503 1 001	KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR PERTANAHAN	PETUGAS PENYULUH	3. KEKERI
	4. DARMAWAN WIBOWO, S.ST NIP. 19790312 199903 1 002	KEPALA SEKSI PENATAAN PERTANAHAN	PETUGAS PENYULUH	4. MIDANG
	5. H. MASTUR, S.H. NIP. 19621231 199010 1 003	KEPALA SEKSI PENGADAAN TANAH	PETUGAS PENYULUH	5. GUNUNG SARI
	6. SUBANDRIO, S.H. NIP. 19630319 198303 1 003	Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan	PETUGAS PENYULUH	6. SESELA
	7. BAIQ MAHYUNIATI FITRIA, S.H., M.H. NIP. 19810623 200903 2 006	Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan	PETUGAS PENYULUH	7. JATISELA
	8. BAIQ IRNI FATMANINGSIH IDJAR, S.IP. NIP. 19830310 200604 2 006	KEPALA SUB SEKSI LANDREFORM DAN KONSOLIDASI TANAH	PETUGAS PENYULUH	8. MEKAR SARI
	9. DEWI LESTARI, S.H. NIP. 19780909 199803 2 004	KEPALA SUB SEKSI PEMANFAATAN TANAH PEMERINTAH DAN PENILAIAN TANAH	PETUGAS PENYULUH	9. RANJOK
	10. CHRISTINE ERLINA RAHAYU, S.H. NIP. 19821225 200604 2 006	KEPALA URUSAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	PETUGAS PENYULUH	10. BABUSSALAM



	2	3	4	5
3. TIM 3				
1. H. MASTUR, S.H. NIP. 19621231 199010 1 003	Kepala Seksi Pengadaan Tanah	Kepala Sub.Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	Ketua Merangkap Anggota Wakil Ketua fisik yang membidangi infrastruktur agraria merangkap anggota	1. GUNUNG SARI 2. SESELA 3. JATISELA
2. MUHAMMAD ZARNUJI, S.Tr. NIP. 19870405 200903 1 001				
3. LALU FIRMAN SUKMAJAYA, S.H., M.H. NIP. 19860407 200912 1 005	Kepala Sub.Seksi Pendaftaran Hak Tanah	Kepala Sub.Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah	Wakil Ketua Yuridis yang membidangi hubungan hukum agraria merangkap anggota	
4. DEWI LESTARI, S.H. NIP.19780909 199803 2 004				
5. KEPALA DESA GUNUNG SARI KEPALA DESA SESELA KEPALA DESA JATISELA			Sekretaris ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

I MADE ARYA SANJAYA, S.H., M.H.  
NIP. 196905101993031002

1	2	3	4	5
2.	TIM 2			
	1. DARMAWAN WIBOWO, S.ST NIP. 19790312 199903 1 002	Kepala Seksi Penataan Pertanahan	Ketua Merangkap Anggota	1. MIDANG 2. RANJOK 3. BABUSSALAM
	2. ILHAM JAUHARI, S.Tr. NIP. 19870812 200903 1 001	Kepala Sub.Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu	Wakil Ketua fisik yang membidangi infrastruktur agraria merangkap anggota	
	3. N U R D A N NIP. 19651231 198701 1 003	Kepala Sub.Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat	Wakil Ketua Yuridis yang membidangi hubungan hukum agraria merangkap anggota	
	4. BAIQ IRNI FATMANINGSIH IDJAR, S.IP. NIP. 19830310 200604 2 006	Kepala Sub.Seksi Landrefrom dan Konsolidasi Tanah	Sekretaris	
	5. KEPALA DESA MIDANG		ANGGOTA	
	KEPALA DESA RANJOK		ANGGOTA	
	KEPALA DESA BABUSSALAM		ANGGOTA	



REVISI KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 46/KEP-100 PTSL/II/2019 TANGGAL 04 FEBRUARI 2019  
TENTANG SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TAHUN 2019  
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat  
Nomor : 64.a /KEP-100 PTSL/III/2019  
Lampiran : 1  
Tanggal : 12 MARET 2019

HAL : SUSUNAN TIM AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TAHUN 2019

NO	NAMA PETUGAS/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5
1.	TIM 1			
1	RURY IRAWAN, S.SiT., M.H NIP. 19760118 199503 1 001	Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan	Ketua Merangkap Anggota	1. PENIMBUNG
2	MAULYNA SRI AUGUSTIA, ST NIP. 19860816 201101 2 010	Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan Dasar dan Tematik Pertanahan	Wakil Ketua fisik yang membidangi infrastruktur agraria merangkap anggota	2. MAMBALAN 3. MEKAR SARI
3	LALU GIGIH FATRIANSAH, S.H NIP. 19860521 200912 1 002	Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	Wakil Ketua Yuridis yang membidangi hubungan hukum agraria merangkap anggota	4. KEKERI
4	IGST. AYU ADNYAWATI, SH NIP. 19720202 199403 2 002	Kepala Sub Seksi Pengendalian, Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar		
5	KEPALA DESA PENIMBUNG		Sekretaris	
	KEPALA DESA MAMBALAN		ANGGOTA	
	KEPALA DESA MEKAR SARI		ANGGOTA	
	KEPALA DESA KEKERI		ANGGOTA	

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat

Nomor : 64.a /KEP-100.PTSL/III/2019

Tanggal : 12 MARET 2019

Lampiran : 7

HAL : SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

NO	NAMA PETUGAS/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5
1.	TIM 1			
	1. I GST. AYU ADNYAWATI, SH NIP. 19720202 199403 2 002	Kepala Sub. Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah	Ketua Satgas Administrasi merangkap anggota	1. PENIMBUNG
	2. SATRIA UNGGANA, S.H.	PPNPN	Anggota	2. MAMBALAN
	3. SUDIAH, S.H.	PPNPN	Anggota	3. MEKAR SARI
	4. AHMAD JUFRI SAHID, S.H.	PPNPN	Anggota	4. KEKERI
	5. TRIA ULANDARI, S.P	PPNPN	Anggota	
2.	TIM 2			
	1. BAIQ IRNI FATMANINGSIH IDJAR, S.IP. NIP. 19830310 200604 2 006	Kepala Sub. Seksi Landrefrom dan Konsolidasi Tanah	Ketua Satgas Administrasi merangkap anggota	1. MIDANG
	2. SATRIA UNGGANA, S.H.	PPNPN	Anggota	2. RANJOK
	3. SUDIAH, S.H.	PPNPN	Anggota	3. BABUSSALAM
	4. AHMAD JUFRI SAHID, S.H.	PPNPN	Anggota	
	5. TRIA ULANDARI, S.P	PPNPN	Anggota	
3.	TIM 3			
	1. DEWI LESTARI, S.H. NIP. 19780909 199803 2 004	Kepala Sub. Seksi Pengendalian, Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlarang	Ketua Satgas Administrasi merangkap anggota	1. GUNUNG SARI
	2. SATRIA UNGGANA, S.H.	PPNPN	Anggota	2. SESELA
	3. SUDIAH, S.H.	PPNPN	Anggota	3. JATISELA
	4. AHMAD JUFRI SAHID, S.H.	PPNPN	Anggota	
	5. TRIA ULANDARI, S.P	PPNPN	Anggota	

KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

**I MADE ARYA SANJAYA, S.H., M.H.**  
NIP. 196905101993031002